

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Nilai Tukar Petani**

Nilai tukar petani merupakan suatu parameter utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani, yang didasarkan pada perbandingan antara indeks harga yang diperoleh dari penjualan hasil produksi ( $I_t$ ) dan indeks harga yang dikeluarkan untuk pembelian barang serta jasa oleh petani ( $I_b$ ). Nilai tukar petani berfungsi sebagai refleksi atas kemampuan pendapatan usaha tani, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk menutup keseluruhan biaya operasional produksi. Nilai tukar petani yang bernilai 100 menggambarkan situasi keseimbangan, yakni pendapatan yang diterima petani sebanding dengan total pengeluaran dan biaya produksi yang harus dibayarkan. Sebaliknya, nilai tukar petani di atas 100 menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan tingkat kesejahteraan petani, sedangkan nilai di bawah 100 menandakan adanya penurunan daya beli dan kesejahteraan petani (Aldillah, 2016).

Fluktuasi nilai tukar petani sangat ditentukan oleh perubahan harga komoditas pertanian, variabilitas biaya input produksi, serta kestabilan harga pangan di pasar. Kenaikan harga output pertanian yang tidak diikuti dengan peningkatan biaya input dapat meningkatkan pendapatan petani dan berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Sebaliknya, apabila biaya input produksi meningkat tanpa adanya penyesuaian pada harga output, maka hal tersebut cenderung menekan pendapatan riil petani, menurunkan daya beli, serta menambah

kerentanan ekonomi pada rumah tangga petani. Ketidakseimbangan pada struktur harga input–output sebagaimana telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya, berpotensi menyebabkan volatilitas nilai tukar petani dan ketidakpastian pendapatan yang diterima oleh petani pada setiap periode tertentu (Aulia et al., 2010).

Lebih jauh, nilai tukar petani memiliki hubungan erat dengan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, di mana peningkatan angka nilai tukar petani mampu memperkuat kapasitas produksi sekaligus mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Petani yang memperoleh pendapatan cukup akan mampu mempertahankan bahkan menambah pekerja dalam proses produksi, sedangkan penurunan nilai tukar petani berimplikasi pada melemahnya kemampuan petani untuk membiayai tenaga kerja, sehingga berpotensi mengurangi jumlah pekerja dan menurunkan produktivitas sektor pertanian secara agregat. Dengan demikian, menjaga stabilitas serta upaya untuk meningkatkan nilai tukar petani menjadi aspek fundamental dalam mendukung keberlanjutan usaha tani dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja pertanian di Indonesia (Aulia et al., 2010).

Menurut Badan Pusat Statistik, mendefinisikan nilai tukar petani sebagai salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

$$NTP = \frac{It}{Ib} \times 100\%$$

Keterangan:

*It* = Indeks harga yang di terima petani

*Ib* = Indeks harga yang di bayar petani

NTP = Nilai Tukar Petani

Simatupang (2001) menyatakan bahwa nilai tukar komoditas pertanian cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan nilai tukar tersebut mencerminkan kemerosotan harga relatif produk pertanian dibandingkan dengan harga barang dan jasa lainnya, yang berdampak pada menurunnya pendapatan riil petani. Dalam jangka pendek, penurunan nilai tukar petani ini tidak langsung menyebabkan petani mengurangi atau menghentikan usaha pertaniannya karena keterbatasan keterampilan untuk bidang non-pertanian, kurangnya modal, serta kondisi lahan yang mendukung produksi pertanian. Namun, tren penurunan nilai tukar petani dalam jangka panjang dapat mengurangi insentif petani untuk meningkatkan produktivitas secara optimal dan mengancam keberlanjutan swasembada pangan, terutama beras.

Hedayana (2001) menyatakan nilai tukar petani merupakan fungsi dari indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar oleh petani. Indeks harga yang diterima mencakup harga tanaman bahan makanan dan perdagangan, sedangkan indeks harga yang dibayar mencakup harga konsumsi rumah tangga dan biaya produksi, termasuk upah dan penambahan barang modal. Selanjutnya, indeks harga yang diterima dipengaruhi oleh harga padi, palawija, sayur-sayuran, dan

buah-buahan, sedangkan indeks harga yang dibayar dipengaruhi oleh harga makanan, perumahan, pakaian, serta berbagai barang dan jasa lainnya.

Saleh (2000) menambahkan bahwa faktor harga memiliki pengaruh besar terhadap nilai tukar penerimaan dan nilai tukar pendapatan petani. Nilai tukar penerimaan dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang diterapkan, serangan hama atau penyakit, kondisi musim dan cuaca, serta harga sarana produksi dan produk pertanian. Sedangkan nilai tukar subsisten dipengaruhi oleh tingkat pendapatan usaha pertanian dan pengeluaran untuk konsumsi pangan.

#### **2.1.1.1 Teori Nilai Tukar Petani**

##### **1. Simatupang dan Isdijoso**

Nilai tukar petani didefinisikan sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari hasil produksi pertanian dengan indeks harga yang dibayar petani, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk pembelian input produksi. Oleh karena itu, nilai tukar petani tidak hanya mencerminkan kondisi pendapatan petani tetapi menggambarkan daya beli dan insentif ekonomi yang diterima sektor pertanian dalam proses pembangunan ekonomi.

Menurut Simatupang dan Isdijoso, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan output nasional maupun regional tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila tidak disertai dengan perbaikan struktur harga yang menguntungkan sektor pertanian. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi sering kali bersifat sektoral dan lebih banyak didorong oleh sektor non-pertanian, sehingga manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan oleh petani. Ketika

harga input produksi dan kebutuhan konsumsi meningkat lebih cepat dibandingkan harga hasil pertanian yang diterima petani, maka pendapatan riil petani cenderung tertekan, meskipun perekonomian secara agregat menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam konteks tersebut, nilai tukar petani berperan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana sektor pertanian memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi serta efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan. Nilai tukar petani mencerminkan perubahan daya beli dan insentif ekonomi petani melalui perbandingan harga output dan input pertanian. Peningkatan nilai tukar petani menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi didukung oleh struktur harga dan kebijakan yang kondusif bagi keberlanjutan usaha pertanian, sedangkan penurunan nilai tukar petani mengindikasikan lemahnya posisi sektor pertanian dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian**

Pendapatan regional diartikan sebagai tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, yang dapat diukur berdasarkan total pendapatan wilayah tersebut atau rata-rata pendapatan masyarakat di daerah tersebut (Tarigan, 2007). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dalam jangka waktu triwulan atau semester. Nilai tambah sendiri merupakan selisih antara nilai produksi (*output*) dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen nilai tambah bruto mencakup pendapatan faktor produksi seperti upah,

gaji, bunga, sewa, dan keuntungan, serta penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor, diperoleh nilai produk domestik regional bruto berdasarkan harga pasar.

Dalam menghitung produk domestik regional bruto berdasarkan harga berlaku, terdapat dua metode yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung menggunakan data asli yang mencerminkan kondisi wilayah yang diperoleh dari sumber data daerah, sementara metode tidak langsung mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional berdasarkan berbagai indikator seperti jumlah produksi, jumlah penduduk, dan luas areal (Tarigan, 2007).

Metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Tarigan, 2007):

#### 1) Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu sektor ekonomi dengan mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto tersebut. Pendekatan ini umum digunakan untuk sektor dengan produksi berupa barang fisik seperti pertanian dan industri.

#### 2) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini mengestimasi nilai tambah dari kegiatan ekonomi dengan menjumlahkan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, termasuk upah, gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

#### 3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, yang meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi

pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Beberapa teori telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena inflasi. Kelompok non-moneteris, seperti aliran Keynesian, meskipun menerima pandangan moneteris, menegaskan bahwa inflasi tidak semata-mata disebabkan oleh ekspansi jumlah uang yang beredar. Inflasi juga dapat muncul akibat peningkatan permintaan agregat yang disebabkan oleh naiknya pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun ekspor netto. Dengan demikian, sumber inflasi tidak hanya berasal dari aspek moneter tetapi juga faktor non-moneter. Selanjutnya, teori ekspektasi menambah pemahaman mengenai inflasi dengan menegaskan bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi terhadap laju inflasi baik melalui model ekspektasi adaptif maupun rasional, yang kemudian memengaruhi perilaku ekonomi dalam merespons perubahan inflasi.

Metode Location Quotient (LQ) digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah dengan kemampuan sektor perekonomian di wilayah yang lebih luas. LQ dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Riyadi dan Brathakusuma, 2005).

$$LQ = \frac{\frac{X_i}{X}}{\frac{Y_i}{Y}}$$

Keterangan :

$X_i$  : PDRB sektor/sub sektor kabupaten/kota

$X$  : PDRB total wilayah kabupaten/kota

$Y_i$  : PDRB sektor/sub sektor tingkat provinsi

$Y$  : PDRB total wilayah tingkat provinsi

### 2.1.2.1 Teori PDRB Sektor Pertanian

#### 1. Wassily Leontief

Menurut Wassily Leontief, pada mulanya mengembangkan analisis input-output untuk membahas perekonomian dan kebijakan pembangunan suatu negara, yang dikenal sebagai Input-Output Nasional. Karena manfaat besar dari teknik ini dalam menganalisis kondisi ekonomi dan penyusunan perencanaan pembangunan, Leontief dianugerahi Penghargaan Nobel dalam bidang Ekonomi pada tanggal 18 Oktober 1973. Model input-output yang dikembangkan pada tahun 1930-an bertujuan untuk mengkaji ketergantungan antar berbagai sektor dalam suatu ekonomi. Salah satu keunggulan analisis input-output adalah kemampuannya menunjukkan keterkaitan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung antara sektor-sektor, baik dari sisi input (*Backward Linkages*) maupun output (*Forward Linkages*). Selain itu, teknik ini dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi perkembangan kondisi ekonomi secara kuantitatif di masa depan. Mengacu pada Miller dan Blair (2009), formulasi analisis input-output berawal dari kenyataan bahwa output produksi suatu sektor ( $X_i$ ) dapat digunakan sebagai input antara ( $z_i$ ) untuk sektor-sektor lain serta bagian sisanya memenuhi permintaan akhir masyarakat (*Final Demand*), yang dirumuskan sebagai:

$$X_i = z_{i1} + z_{i2} + \dots + z_{in} + Y_i, i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana unsur  $z_i$  pada ruas kanan persamaan di atas lazim dinamakan sebagai jumlah penjualan ke beberapa sektor terkait (*interindustry sales*),



sedangkan unsur  $Y_i$  jumlah penjualan untuk memenuhi permintaan akhir. Dengan demikian, persamaan tersebut menunjukkan distribusi hasil produksi sektor  $i$ . Oleh karena dalam suatu perekonomian biasanya terdapat banyak ( $n$ ) sektor, maka distribusi hasil produksi tersebut untuk keseluruhan sektor. Model input-output, ketika diaplikasikan secara tepat, dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memperkirakan bagaimana efek dari suatu perubahan pada aktivitas ekonomi. Misalnya efek perubahan jumlah permintaan pada produk domestik bruto suatu negara. Model input-output Leontief terdiri atas dua jenis:

- a. Model terbuka, di mana sebagian output digunakan oleh industri sendiri dan sisanya dikonsumsi oleh pihak eksternal. Contohnya, pembangkit listrik menggunakan sebagian energi yang dihasilkan dan mendistribusikan sisanya ke masyarakat. Tantangan utama model ini adalah menentukan tingkat produksi yang memenuhi permintaan eksternal sekaligus kebutuhan internal sistem, secara matematis dirumuskan sebagai  $x = Zx + f$ .
- b. Model tertutup, di mana seluruh hasil produksi dikonsumsi oleh industri sendiri tanpa permintaan eksternal. Model ini biasanya digunakan untuk menentukan harga relatif produk, dengan persamaan  $x = Ax$ .

### **2.1.3 Inflasi**

Menurut badan pusat statistik, inflasi yaitu terjadinya perbedaan relatif harga pada suatu periode tertentu biasanya dihitung dalam periode antar bulan maupun tahunan, sehingga angka-angka inflasi itu seringkali kita dengan seperti inflasi month to month atau yang berarti keterbandingan relatif harga bulan ini

dengan bulan sebelumnya, selain bulanan ada juga inflasi year on year artinya keterbandingan relatif harga tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Inflasi jangka pendek dan jangka panjang memiliki karakteristik serta faktor penentu yang berbeda. Dalam jangka pendek, inflasi umumnya dipengaruhi oleh guncangan sementara dalam perekonomian, seperti kenaikan suku bunga, depresiasi nilai tukar, kenaikan harga komoditas impor, dan gangguan pasokan, di mana penyesuaian output belum berlangsung optimal sehingga perubahan biaya dan permintaan agregat langsung tercermin pada harga. Contoh inflasi jangka pendek adalah kenaikan harga bahan bakar minyak atau bahan pangan akibat gangguan distribusi atau fluktuasi harga internasional yang bersifat sementara. Sebaliknya, inflasi jangka panjang bersifat lebih persisten dan dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi, terutama pertumbuhan jumlah uang beredar, konsumsi rumah tangga, suku bunga, dan nilai tukar. Contoh inflasi jangka panjang dapat dilihat pada kecenderungan kenaikan harga secara berkelanjutan akibat pertumbuhan uang beredar yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan output serta ketergantungan terhadap impor dalam jangka waktu yang lama, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Pratiwi, 2013).

Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

$$\pi_t \left( \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \right)$$

Keterangan:

$I_t$  : IHK pada periode saat ini (misalnya, bulan ini atau tahun ini).

$I_{t-1}$ : IHK pada periode sebelumnya (misalnya, bulan lalu atau tahun lalu).

IHK: Indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Lerner dalam Sumodiningrat (2001), inflasi merupakan kondisi ketika terjadi kelebihan permintaan agregat terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sejalan dengan definisi tersebut, Sukirno (2013) mendefinisikan inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam perekonomian. Mankiw (2000) juga menyatakan bahwa inflasi adalah peningkatan tingkat harga secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, pengendalian inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil menjadi salah satu tujuan utama kebijakan bank sentral di berbagai negara, karena inflasi yang terkendali diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta menjamin ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Berbagai teori telah dirumuskan untuk menjelaskan fenomena inflasi. Kelompok non-moneteris, seperti aliran Keynesian, menerima pandangan moneteris namun menambahkan bahwa inflasi tidak selalu disebabkan oleh ekspansi jumlah uang beredar semata. Inflasi juga dapat timbul akibat kenaikan permintaan agregat yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor netto. Dengan kata lain, faktor-faktor penyebab inflasi tidak hanya bersumber dari aspek moneter tetapi juga non-moneter (Sumodiningrat, 2001).

### **2.1.3.1 Teori Inflasi**

#### **1. Keynesian**

Dalam teori Keynesian, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam jangka pendek, digambarkan melalui interaksi antara kurva Permintaan Agregat (AD) dan Penawaran Agregat (AS). Dalam model ini, berbagai faktor seperti perubahan ekspektasi, kondisi pasar tenaga kerja, harga faktor produksi, serta kebijakan fiskal dan moneter berperan mendorong tingkat inflasi dan output ekonomi. Hubungan ini bersifat positif dalam jangka pendek, yang berarti inflasi yang meningkat biasanya disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Namun, dalam jangka panjang, hubungan tersebut dapat berubah menjadi negatif, di mana inflasi yang terus-menerus tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.4 Upah Minimum Provinsi**

Menurut Sukirno (2005) menjelaskan bahwa upah merupakan pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja dari hasil melakukan suatu kegiatan ekonomi atau untuk menghasilkan barang dan jasa. Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena jumlah upah atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya perusahaan. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksud untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat.

Adapun kebijakan dan pengaturan pembagian upah, harus dilaksanakan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai pengupahan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan”
- Ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tersebut, dapat dijadikan landasan dalam menentukan besarnya upah pekerja atas jasa yang telah dilakukannya. Upah diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja, yang terikat dalam suatu hubungan kerja dan berdasar pada perjanjian kerja. Penentuan besarnya upah disesuaikan dengan standar upah minimum yang berlaku. Dalam hakikat hubungan kerja, meskipun secara yuridis formal hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja adalah sama di hadapan hukum, namun secara sosioogis tidak demikian.

Hal ini disebabkan karena pemberi kerja mempunyai kedudukan yang lebih berkuasa, jika dibandingkan dengan tenaga kerja. Hubungan anantara pemberi kerja dan tenaga kerja bersifat subordinative atau vertikal ke bawah, sehingga kedudukan antara mereka tidak sama derajatnya satu sama lain. Menurut Hakim (2006), pemberian upah dari pemberi kerja kepada tenaga kerja harus memperhatikan tiga aspek, yaitu:

1. Aspek teknis

Aspek ini tidak hanya mencakup mekanisme perhitungan dan proses pembayaran upah tetapi juga prosedur penetapan upah secara menyeluruh.

## 2. Aspek ekonomis

Aspek berfokus pada kondisi ekonomi baik dari sisi makro maupun mikro, serta mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan dalam penentuan nilai upah dan pelaksanaannya di lapangan.

## 3. Aspek hukum

Aspek meliputi rangkaian proses dan kewenangan dalam menetapkan upah, pelaksanaan pembayaran, perhitungan upah, serta pengawasan terhadap penerapan ketentuan terkait upah.

Upah minimum merupakan standar upah terendah yang ditetapkan sebagai batas minimal pemberian upah oleh pelaku usaha, pemilik modal, atau pihak industri kepada pekerja dalam lingkup perusahaannya (Permadi dan Chrystanto, 2021). Upah minimum ini khususnya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja dari nol sampai satu tahun. Penetapan upah minimum bertujuan memberikan perlindungan pendapatan kepada pekerja atau buruh. Namun, saat ini nilai upah minimum masih berada di bawah standar kebutuhan hidup layak karena pendapatannya dipengaruhi oleh kemampuan serta keseimbangan perusahaan dalam menetapkan dan mengimplementasikan upah tersebut. Secara administratif, terdapat dua jenis upah minimum, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten/Kota. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan kepada perusahaan yang memanfaatkan jasanya.

#### **2.1.4.1 Teori Upah Minimum**

##### **1. David Ricardo**

Dalam teori David Ricardo, upah ditentukan oleh biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup tenaga kerja, yang disebut sebagai "upah alami". Upah alami ini merupakan tingkat upah minimum yang harus diterima oleh pekerja agar dapat bertahan hidup dan melanjutkan keturunannya. Ricardo juga menjelaskan bahwa apabila upah melebihi tingkat upah alami, maka jumlah tenaga kerja akan meningkat; sebaliknya, jika upah berada di bawah tingkat ini, jumlah tenaga kerja akan menurun. Oleh karena itu, upah alami berfungsi sebagai batas bawah yang relatif stabil dalam penentuan upah di pasar tenaga.

#### **2.1.5 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian**

Menurut Mulyadi dikutip dari penelitian Masru'ah dan Soejoto (2013) tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam rentang usia produktif (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk di suatu negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa apabila terdapat permintaan terhadap tenaga kerja tersebut dan mereka bersedia berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Sementara itu, menurut Arfida (2003:19), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif (working-age population) yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Besaran populasi umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara, yang secara umum merepresentasikan tingkat kemajuan ekonomi negara tersebut. Beberapa pendapat menyatakan bahwa populasi yang besar memberikan keuntungan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Tenaga

kerja di sektor pertanian mencakup pekerja yang terlibat dalam kegiatan pertanian, termasuk di dalamnya perkebunan, perikanan, kehutanan, dan perburuan. Tenaga kerja ini, baik secara mandiri maupun bersama pihak lain, bertanggung jawab dalam memimpin, menyelenggarakan, mengawasi, atau melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perburuan, serta penangkapan hewan atau aktivitas lain yang terkait (Badan Pusat Statistik, 2011).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan hal ini juga berlaku pada tingkat regional. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Sobita dan Saputra (2014) yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto serta sewa modal di sektor pertanian memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Secara tidak langsung, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan di sektor pertanian, yang ditandai dengan peningkatan sewa modal, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Walaupun penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian relatif menurun dibandingkan dengan sektor lain, namun peran sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja masih tetap dominan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian (Rusastra dan Suryadi, 2004). Perpindahan tenaga kerja pertanian ke nonpertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor nonekonomi. Hasil kajian Tocco (2012) menunjukkan bahwa ada lima kelompok faktor yang memengaruhi keputusan untuk pindah pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, yaitu (1) karakteristik individu (umur, pendidikan,



pengalaman, jender, status perkawinan, dan suku bangsa), (2) karakteristik keluarga (jumlah anak, umur anak, dan ukuran keluarga), (3) karakteristik usaha pertanian (ukuran penguasaan lahan, ukuran usaha tani, output pertanian, sistem usaha tani, dan produktivitas pertanian), (4) karakteristik finansial (pendapatan di luar pekerjaan, subsidi pertanian, manfaat sosial, dan pendapatan tidak tetap), dan (5) karakteristik lokasi dan pasar tenaga kerja (tingkat penyerapan tenaga kerja, akses terhadap pekerjaan, kepadatan penduduk, urbanisasi, dan lokasi wilayah).

#### **2.1.5.1 Teori Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian**

##### **1. Todaro**

Menurut Todaro (2003), penyerapan tenaga kerja merujuk pada penerimaan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Penyerapan tenaga kerja juga menggambarkan kondisi adanya ketersediaan tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh pencari kerja. Secara kuantitatif, penyerapan tenaga kerja diartikan sebagai jumlah individu yang terlibat aktif dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks suatu unit usaha, penyerapan tenaga kerja merupakan total tenaga kerja yang digunakan untuk menjalankan aktivitas produksi. Keberadaan tenaga kerja yang terserap dalam sektor perekonomian ini berdampak pada peningkatan produksi barang dan jasa secara signifikan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara simultan, yang berperan dalam menentukan tingkat upah keseimbangan serta keseimbangan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja terkait erat dengan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan maupun instansi tertentu.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

| No  | Judul, Penulis dan Tahun                                                                                                               | Persamaan                                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                         | Sumber                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                         | (4)                                                                                                                                | (5)                                                                                                                                                                      | (6)                                                                                  |
| 1.  | Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Petrus dan Yuliawati, 2022) | Menganalisis NTP dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, fokus dampak faktor ekonomi terhadap sektor pertanian.                       | Wilayah Sumatera Selatan (2012-2020), tidak spesifik PDRB pertanian, inflasi, UMP menggunakan analisis shift-share, bukan regresi. | Perubahan struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan ditandai dengan turunnya peran sektor pertanian dalam PDRB, sementara sektor jasa meningkat dan industri stabil. | Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 18 No. 2, Juni 2022                            |
| 2.  | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Kabupaten Muaro Jambi (Tamala et al., 2023)                 | Sama-sama menganalisis penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan menggunakan variabel PDRB sektor pertanian serta upah minimum (UMR/UMP) | NTP dan inflasi, wilayah penelitian terbatas pada kabupaten, serta menggunakan data time series.                                   | Secara simultan PDRB sektor pertanian, luas lahan, UMR, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara parsial, PDRB                      | Agricultural Socio-economic Empowerment and Agribusiness Journal, Vol. 2 No. 1, 2023 |

|    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                      | sektor pertanian berpengaruh positif signifikan, sedangkan UMR berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. |                                                        |
| 3. | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Sumatera Utara (Andika et al., 2019)                                                      | Sama-sama meneliti penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, inflasi dan UMP.                                       | Lokasi Sumatera Utara, bukan Pulau Jawa, periode 1986–2016, NTP dan PDRB pertanian.  | Inflasi dan investasi berpengaruh positif signifikan, UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian       | Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis, Vol. 1 No. 1 (2019) |
| 4. | Pengaruh PDRB Sektor Pertanian, Luas Lahan Sawah, dan UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2023 (Iftinan et al., 2024) | Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, menggunakan variabel PDRB sektor pertanian dan UMP, lokasi di Pulau Jawa. | Tidak menggunakan Nilai Tukar Petani dan inflasi, hanya satu provinsi (Jawa Tengah). | PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif tidak signifikan, UMP berpengaruh negatif signifikan, luas lahan tidak signifikan.                     | Agrimansio n Vol. 34 No. 3 (2024)                      |
| 5. | Analisis Pengaruh Fiskal dan Moneter terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di                                                                                  | Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.                                                                           | NTP, PDRB sektor pertanian, dan UMP,                                                 | Secara simultan variabel fiskal dan moneter berpengaruh                                                                                          | AGRISTA Vol. 4 No. 3 (2016)                            |

|    |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Indonesia (Anisa et al., 2016)                                                                  |                                                                 | lokasi nasional, periode 2000-2014.                                                                                            | signifikan; secara parsial penerimaan pajak berpengaruh positif dan jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pertanian                                                                                                                                                            |                                         |
| 6. | Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah (Dian dan Anik, 2025) | Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di wilayah Pulau Jawa. | Provinsi Jawa Tengah (35 kabupaten/kota) dengan variabel jumlah penduduk, PDRB pertanian, upah pertanian, angka harapan hidup. | Di Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, sementara PDRB sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan. Upah pertanian dan angka harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja tersebut. | Jurnal Ekonomi-Qu, 2025                 |
| 7. | Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di                                            | Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian,                       | Lokasi Kalimantan Selatan, NTP, inflasi,                                                                                       | PDRB sektor pertanian, luas lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frontier Agribisnis Vol. 7 No. 1 (2023) |

|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Provinsi Kalimantan Selatan (Alia et al., 2023)                                                                                                                                          | PDRB sektor pertanian, UMP.                                           | periode 2001-2020.                       | pertanian, dan UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.                                                                                                       |                                       |
| 8. | Pengaruh Kinerja Ekonomi, Investasi dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Indonesia (Berryl dan Mike, 2024)                                                      | PDRB, UMP, Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian.                  | Investasi, NTP, Inflasi.                 | Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Upah berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. | Jurnal Ilmu Ekonomi / Penelitian 2024 |
| 9. | Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan 2012-2020 (Petrus dan Yuliawati, 2022) | PDRB sektor pertanian, NTP, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. | Fokus di Sumatera Selatan, UMP, Inflasi. | Sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi PDRB dan penyerapan tenaga kerja. NTP menurun menunjukkan kesejahteraan petani rendah. Penyerapan tenaga kerja sektor                                          | Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2022 |

|     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                              | pertanian tinggi tapi produktivitas rendah.                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 10. | Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Kabupaten Lamongan (Halimatus dan Taufiq, 2023)                                                       | PDRB sektor pertanian, upah minimum, NTP, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. | Inflasi                                      | PDRB sektor pertanian dan upah riil buruh tani berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Luas lahan pertanian dan NTP tidak berpengaruh signifikan.                                    | JAe Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 2023           |
| 11. | Pengaruh PDRB sektor pertanian, nilai tukar petani dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Jambi (Simanjuntak et al., 2018) | PDRB sektor pertanian, NTP, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.               | Inflasi                                      | PDRB sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. NTP dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di Provinsi Jambi. | e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 2018 |
| 12. | Pengaruh PDRB Sektor Pertanian dan UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di                                                                     | PDRB Sektor Pertanian, UMP, penyerapan tenaga kerja                                 | NTP, Inflasi, fokus wilayah: Provinsi Jambi, | PDRB sektor pertanian dan UMP berpengaruh positif                                                                                                                                                             | Jurnal Development, Vol. 9 No. 1 (2021)          |

|     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | Provinsi Jambi (Basri dan Putra, 2021)                                                                                                                                      | sektor pertanian.                                                                                                                                                        | bukan Pulau Jawa.                                                                                                                                                 | terhadap penyerapan tenaga kerja.                                                                                                                                       |                                                                      |
| 13. | Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Rezky et al., 2016)                                                               | Sama-sama menganalisis penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan menggunakan variabel PDRB sektor pertanian serta Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai faktor penentu. | Penelitian jurnal bersifat regional (kabupaten) dan time series, tidak memasukkan nilai tukar petani, inflasi, serta tidak menggunakan data panel antar provinsi. | PDRB sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, UMP berpengaruh negatif dan signifikan, sementara investasi tidak signifikan | e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5 No.1 (2016)        |
| 14. | Pengaruh PDB sektor pertanian, nilai tukar petani dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia (Erlina dan Iskandar, 2023)                  | PDRB sektor pertanian, NTP, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.                                                                                                    | UMP, Inflasi.                                                                                                                                                     | PDB sektor pertanian dan investasi tidak berpengaruh signifikan, NTP berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.                                   | Jurnal Samudra Ekonomika                                             |
| 15. | Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Inflasi, dan Nilai Tukar Petani terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jambi (Putri et al., 2025) | Sama-sama menganalisis penyerapan/kesempatan kerja sektor pertanian serta menggunakan variabel PDRB sektor pertanian, inflasi, dan NTP.                                  | Mencakup satu provinsi (Jambi), tidak memasukkan UMP, dan menggunakan data time series, sedangkan skripsi menggunakan lintas provinsi di Pulau Jawa.              | Secara simultan PDRB sektor pertanian, inflasi, dan NTP berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja sektor pertanian. Secara parsial,                              | Neraca Akuntansi Manajemen Ekonomi (MUSYTA RI), Vol. 24 No. 11, 2025 |

---

PDRB  
 sektor  
 pertanian  
 berpengaruh  
 positif  
 signifikan,  
 NTP  
 berpengaruh  
 signifikan,  
 sedangkan  
 inflasi tidak  
 berpengaruh  
 signifikan.

---

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran digunakan untuk memudahkan arah di dalam penelitian (Garnella et al., 2020).

### 2.3.1 Hubungan Nilai Tukar Petani dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Nilai tukar petani mengukur rasio nilai barang dan jasa yang diterima petani dengan biaya yang mereka keluarkan untuk produksi dan konsumsi, sehingga nilai ini tidak secara langsung mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap. Dengan kata lain, kenaikan atau penurunan nilai tukar petani tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan penyerapan tenaga kerja, dikarenakan faktor eksternal lain seperti mekanisasi dan pergeseran struktur ekonomi yang juga sangat memengaruhi dinamika tenaga kerja di sektor pertanian (Sakdiyah dan Taufiq, 2023).

### 2.3.2 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Keterkaitan antara produk domestik regional bruto sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut menunjukkan adanya



hubungan timbal balik dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan temuan penelitian pada jurnal ini, variabel produk domestik regional bruto sektor pertanian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja pertanian. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja ekonomi sektor pertanian, melalui pertumbuhan produksi, distribusi, serta pemanfaatan faktor input, berkontribusi pada peningkatan ketersediaan lapangan kerja, (Simanjuntak et al., 2018).

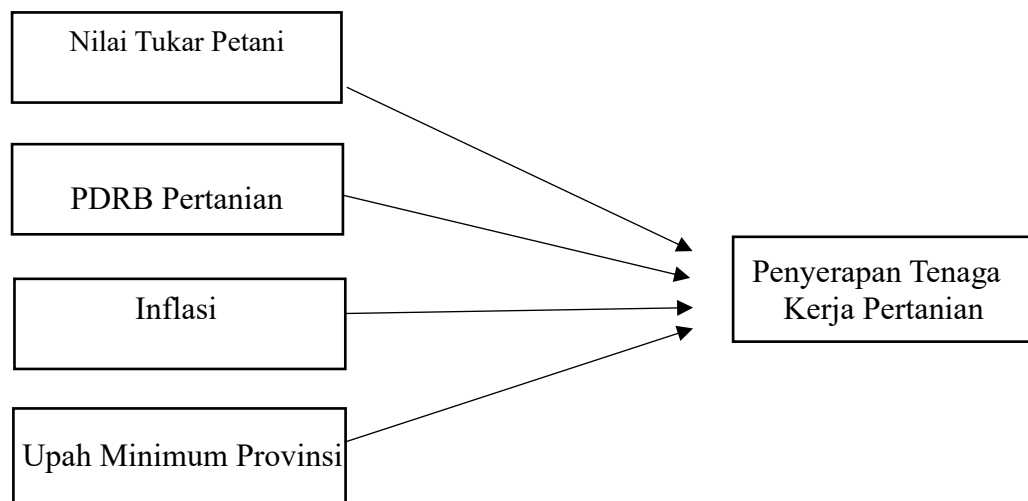
### **2.3.3 Hubungan Inflasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian**

Hubungan antara inflasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian merupakan aspek yang krusial dalam memahami dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, peningkatan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga dapat merangsang aktivitas ekonomi di sektor pertanian sehingga menciptakan lebih banyak peluang kerja. Oleh karena itu, stabilitas harga tetap menjadi faktor penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan investasi yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja (Indriyani, 2016).

### **2.3.4 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian**

Upah minimum provinsi tidak selalu memberikan dampak signifikan, namun ketika dipertimbangkan secara simultan bersama dengan luas lahan pertanian, upah minimum provinsi berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengimplikasikan bahwa perubahan pada

upah minimum provinsi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menerima tenaga kerja, dengan mempertimbangkan faktor lain seperti luas lahan sebagai variabel pendukung (Iksan et al., 2020). Gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Nilai Tukar Petani, Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian berpengaruh positif, sedangkan inflasi dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian provinsi di Pulau Jawa pada periode 2020-2024.
2. Diduga secara bersama-sama Nilai Tukar Petani, Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian, inflasi, dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di provinsi di Pulau Jawa pada periode 2020-2024.